

**Judul** : Anggota Komisi III DPR bicara OTT, bersihkan sapu kotor di penagak hukum  
**Tanggal** : Sabtu, 27 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Anggota Komisi III DPR Bicara OTT Bersihkan Sapu Kotor Di Penegak Hukum

FOTO: IG PRIBADI



**Rudianto Lallo**

ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo meminta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum jaksa menjadi momentum memperkuat pengawasan dan pembinaan. OTT antar sesama aparat penegak hukum sebenarnya memiliki sisi positif sebagai fungsi kontrol.

"Karena tidak bisa dipungkiri ada saja oknum-oknum yang mungkin masih 'sapu kotor' di dalam institusi penegak hukum," ujar Rudianto, dalam keterangannya, Kamis (24/12/2025).

Diketahui, KPK melaksanakan OTT terhadap oknum jaksa di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan Jakarta, Rabu (17/12/2025). Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan.

Selain itu, OTT KPK juga menyoar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel) Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HSU Asis Budianto. Kedua orang tersebut sudah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK atas dugaan pemerasan.

Rudianto melanjutkan, OTT terhadap jaksa kini bukan lagi merupakan peristiwa yang luar

biasa di mata masyarakat. Karena seringnya kejadian serupa sehingga membuat masyarakat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah.

"OTT jaksa itu bukan pertama kali, sudah banyak peristiwa sebelumnya. Jadi bukan barang istimewa lagi bagi masyarakat," kata politikus Nasdem ini.

Untuk itu, Rudianto mendorong adanya penguatan dari sisi pengawasan dan pembinaan personel. Sistem promosi di internal kejaksaan harus benar-benar dijaga agar hanya jaksa-jaksa terbaik yang menduduki posisi strategis.

"Kejaksaan ke depan harus lebih selektif dan transparan dalam melakukan kaderisasi untuk mencegah munculnya penyimpangan di masa mendatang," harap legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menambahkan, kejaksaan membutuhkan reformasi yang menyeluruh dan sistemik untuk memperkuat integritas lembaga penegak hukum. Utamanya pada bagian pengawasan. Kejaksaan Agung (Kejagung) mesti melakukannya secara melekat dan terus-menerus terhadap seluruh jajarannya.

Hal ini dilakukan menyusul maraknya jaksa yang terjaring OTT KPK. "Pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial, terutama pada aspek pengawasan," ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Abdullah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan. Seluruh data yang berkaitan dengan kinerja dan kewenangan lembaga, perlu dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. "Juga transparan dan akuntabel terkait semua data yang berhubungan dengan tupoksinya," ujar politikus PKB ini. ■ TIF